



Peran humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat

Andi Wiratna, Siti Awaliyah*, Rista Ayu Mawarti

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: siti.awaliyah.fis@um.ac.id

Paper received: 20-10-2022; revised: 15-11-2022; accepted: 10-12-2022

Abstract

This study aims to discuss the roles, programs, obstacles faced and the efforts made by the Public Relations of the DPR RI in strengthening civic literacy. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The Public Relations of the DPR RI has the role of communicator and facilitator. The program activities carried out are the parliamentary education program, the youth parliament program, the campus parliamentary program and the community visit program. The inhibiting factor in implementing the program is the lack of competent human resources (SDA) in their field, the lack of facilities and infrastructure as well as time allocation. Efforts to overcome obstacles are by conducting natural resource development by participating in training or collaborating with other work units, increasing the number of room capacities used, providing more contemporary innovations, and providing tokens in the form of regulations for the DPR RI, magazines and parliamentary bulletins. so that the information that has been carried out in the activity can be understood again by the community.

Keywords: public relations DPR RI; citizenship literacy; society

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk membahas peran, program, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Humas DPR RI mempunyai peran komunikator dan fasilitator. Program kegiatan yang dilakukan yakni program edukasi parlemen, program parlemen remaja, program parlemen kampus dan program kunjungan masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan programnya ialah masih minimnya sumber daya manusia (SDA) yang kompeten dibidangnya, minimnya dari segi sarana dan prasarana maupun alokasi waktu. Upaya untuk mengatasi hambatan ialah dengan mengadakan pengembangan SDA dengan cara mengikuti pelatihan ataupun berkolaborasi dengan unit kerja lainnya, peningkatan jumlah kapasitas ruangan yang digunakan, memberikan inovasi yang lebih kekinian, serta memberikan tanda mata berupa tata tertib DPR RI, majalah dan buletin Parlementeria. agar informasi yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan dapat dipahami kembali oleh masyarakat.

Kata kunci: humas DPR RI; literasi kewarganegaraan; masyarakat

1. Pendahuluan

Literasi memiliki pengaruh besar terhadap peradaban suatu bangsa. Literasi tak sekedar membaca juga menulis, namun literasi juga dapat bermakna melek teknologi, politik, dan pemikiran kritis serta peka pada kondisi lingkungan sekitarnya (Irianto & Febrianti, 2017). Literasi merupakan kemampuan dan keterampilan dasar dari individu yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi yang memadai mampu memberikan bantuan pada generasi muda kita saat memahami informasi, dengan bentuk tertulis ataupun

tak tertulis. Keterampilan literasi mencakup kemampuan mengolah suatu informasi dari data dan menginterpretasikan bacaan dalam konteks tertentu (Sujastika & Abdulkarim, 2022). Disamping hal tersebut, melalui penguasaan literasi tentu akan menciptakan generasi muda yang mampu memilih suatu informasi guna menyokong kehidupan. Setiap warga negara hendaknya memiliki kemampuan literasi sehingga dapat mewujudkan warga negara cerdas.

Tingkat literasi masyarakat di Indonesia masih cenderung rendah hal tersebut diperkuat berdasar survei Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization For Economic Co-operation and Development (OECD) saat tahun 2019, dalam survei diketahui jika kemampuan membaca masyarakat di Indonesia berada diperingkat 62 dari 70 Negara, ataupun menjadi 10 Negara paling bawah dengan kemampuan tingkat literasi rendah. Hasil tes ini tentu saja membuat kita prihatin dengan kemampuan bertahan bagi generasi muda yang akan datang. Jika kondisi ini tidak disikapi dengan pemahaman yang baik, kemampuan memahami situasi dan berpikir luas, tentu akan menimbulkan masalah apalagi masyarakat kita yang multikultur. Oleh karena itu keterampilan literasi perlu terus ditingkatkan, salah satu keterampilan literasi yang harus terus digalakkan dan harus dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat ialah literasi kewarganegaraan. Yuliadari, Rusnaini dan Ariana (2018) mengungkapkan literasi kewarganegaraan dijadikan suatu tuntutan sejalan pada perkembangan juga kemajuan teknologi serta arus globalisasi.

Literasi kewarganegaraan diartikan sebagai kapasitas wawasan juga keterampilan warga negara saat mempelajari dunia politik hingga bisa ikut serta dengan aktif pada perubahan kehidupan masyarakat. Fudge dan Skipworth (2017) mengutarakan jika literasi kewarganegaraan ialah kemampuan yang berarti untuk masyarakat untuk dipahami sebab memberi dasar pemahaman yang tepat mengenai kekompleksan pemerintahan serta dunia politik. Sejalan dengan hal itu literasi kewarganegaraan menurut Saidi, Supriyono, dan Al-Atok (2022) ialah sekumpulan wawasan juga kesanggupan seseorang mengamati, memahami, dan menyelesaikan permasalahan layaknya isu siasal, politik juga negara. Seperti Suryadi (2010) yang mengungkapkan pada disiplin kewarganegaraan menempatkan literasi kewarganegaraan selaku elemen dasar political virtue of citizenship juga penguasaan bentuk political knowledge warga negara kemudian diimplementasikan pada kegiatan kewarganegaraan. Dapat dipahami bahwa Literasi kewarganegaraan merupakan keterampilan literasi dasar serta menjadi suatu hal yang penting dilakukan agar meningkatkan kemampuan pemahaman masyarakat terhadap kondisi disekitar.

Literasi kewarganegaraan sudah diterapkan pada sekolah dimulai pada tingkat dasar sampai menengah atas. Hal ini bisa dibuktikan melalui kajian yang dilaksanakan oleh Hamid, et al. (2020) yang menunjukkan pada jenjang dasar literasi kewarganegaraan dilakukan melalui kegiatan pembelajaran berbasis olah vokal serta permainan tradisional. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Yusuf dan Putra (2019) pada jenjang menengah pertama literasi kewarganegaraan dilakukan melalui kegiatan proses pembelajaran dalam PPKn, IPS dan Seni Budaya, Study Tour dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kajian yang dilakukan oleh Maimun et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pada jenjang menengah atas literasi kewarganegaraan dilakukan melalui kegiatan rutin sekolah dengan mengundang narasumber dari berbagai institusi seperti kepolisian, TNI, hingga BNN untuk memberikan sosialisasi mengenai hak juga kewajiban warga negara. Adapun manfaat dari aktivitas literasi kewarganegaraan bagi semua lapisan masyarakat yakni mampu memberikan bantuan kepada

mereka saat hendak melakukan tindakan serta hidup bersosialisasi yang menggambarkan warga negara yang baik.

Penguatan literasi kewarganegaraan sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi kewarganegaraan membuat individu dapat memiliki tingkah laku yang baik saat hidup bermasyarakat, serta menimalisir hal yang menyebabkan disintegrasi (Tachyudin, Cahyono & Utami, 2020). Pada substansinya penguatan literasi kewarganegaraan masyarakat, kapabel dilakukan dan dilaksanakan melalui program Bagian Hubungan Masyarakat DPR RI, yang menjadi praktik komunikasi politik dari lembaga legislatif. Terlebih masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai program kerja, pencapaian, kebijakan, dan dinamika dari DPR RI, selaku instansi perwakilan masyarakat. Karena berbasis pada UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 3, yang menegaskan visi keterbukaan informasi adalah guna memenuhi hak mengetahui masyarakat tentang kebijakan serta pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi dan melek politik masyarakat, juga untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi.

Pada awalnya, eksistensi bagian Humas DPR RI sebatas untuk memberi informasi kepada masyarakat, mengenai aktivitas dan program kerja DPR RI. Tetapi dengan tantangan zaman, serta tuntutan masyarakat untuk terlibat dalam praktik politik dan sosial, membuat program kerja Humas DPR RI, menjadi holistik, karena memuat upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Prasetyo (2016) memaparkan keberadaan Humas DPR RI berorientasi untuk memudahkan interaksi dan komunikasi politik dengan masyarakat, supaya eksistensi DPR RI lebih inklusif dan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Eksistensi Humas DPR RI, perlu mengakomodir upaya penguatan literasi kewarganegaraan masyarakat, karena berkaitan dengan upaya pengelolaan bonus demografi. Merujuk survei Kemendikbud (2017) menjelaskan Indonesia diproyeksi menjadi pusat ekonomi terkuat ke-5 pada 2045, juga menyokong 38% total penduduk produktif di ASEAN. Maka berpotensi menjadi negara berpengaruh pada kawasan Asia Pasifik, juga mendapat peran penting atas orientasi peradaban dunia di masa depan. Sehingga eksistensi Humas DPR RI melalui program kegiatan kerjanya perlu mampu memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat, supaya menjadi warga negara yang mampu diandalkan.

Pada substansinya keberadaan Humas berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berfokus untuk memberikan informasi komprehensif pada masyarakat mengenai program kerja dan kebijakan DPR RI. Tentu tidak sebatas orientasi tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan citra positif lembaga DPR RI di masyarakat Indonesia. Supaya kepercayaan publik membaik juga fungsi lembaga legislatif bisa dieksekusi secara efektif dan efisien, Merujuk survei Litbang Kompas (2019) memaparkan sejumlah 62,4% responden memberikan penilaian pada DPR RI bercitra tak baik, dan sebanyak 24,8% responden menilai DPR RI bercitra baik, lalu responden yang memberikan jawaban tidak tahu juga tak memberi jawaban, yaitu sejumlah 11,5% serta 1,3%. Realitas tersebut merupakan ironi karena DPR RI seharusnya menjadi lembaga yang menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat, dan menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya survei tersebut masyarakat dapat mengetahui kondisi kenyataan di parlemen bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih mempunyai citra buruk, namun demikian masyarakat perlu mengetahui juga bahwa masih ada juga citra positif dimana kebijakan yang dilakukan oleh DPR RI benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu keberadaan bagian Humas DPR RI perlu menjadi lembaga yang berperan penting dalam menanamkan kepercayaan publik kepada DPR

RI melalui kegiatan program yang dilakukan, sehingga diharapkan mampu memperoleh kembali citra positif.

Keterampilan literasi kewarganegaraan masyarakat perlu ditingkatkan dan terus digalakkan oleh bagian Humas DPR RI melalui kegiatan-kegiatan program kerjanya. Selain itu juga Humas DPR RI sebagai komunikasi kepada rakyat mengenai kelembagaan DPR RI serta pensosialisasian informasi yang harus diketahui oleh rakyat mengenai DPR RI. Sehingga kemampuan memahami situasi dan berpikir luas dapat dimiliki oleh masyarakat kita dan dapat peduli terhadap lingkungan sosial disekitar. Mazid (2017) mengungkapkan warga negara yang memiliki literasi kewarganegaraan, akan menerima realitas Indonesia selaku bangsa yang multikultur, secara sukarela, dan menjadi pribadi yang demokratis, beradab adil dan partisipatif.

Kajian ini berfokus pada peran Humas DPR RI dalam menguatkan literasi kewarganegaraan masyarakat, meneleah serta merefleksikan upaya dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat melalui kegiatan program kerja Humas DPR RI, selaku praktik dari konsep Pendidikan Kewarganegaraan secara luas (citizenship education). Sehingga kajian ini mempunyai novelty bersifat jelas, yaitu, dikembangkannya konsep juga praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara luas dengan aktivitas program kerja Humas DPR RI yang bertujuan untuk memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan: (1) Bagaimana peran Humas DPR RI untuk memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat; (2) Apa saja kegiatan program yang dilakukan humas DPR RI untuk memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat; (3) Kendala Humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan; (4) Upaya Humas DPR RI dalam mengatasi kendala dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat.

2. Metode

Kajian ini mempergunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam mengungkapkan masalah yang terdapat dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta dan kemasyarakatan, hingga bisa dipergunakan sebagai sebuah kebijakan agar tercapainya kesejahteraan bersama (Alhabib & Suratman, 2018). Kajian kualitatif tersebut dipakai sebab diperkirakan dapat mendeskripsikan juga memaparkan peranan Humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat. Kajian ini didasari oleh tahapan mencari data secara lengkap yakni data yang terkumpul lebih mempergunakan kata-kata maupun gambar dari pada angka. Sesuai dengan kajian kualitatif, hadirnya peneliti di lapangan sangatlah berarti juga dibutuhkan dengan optimal. Wilayah kajian yang dijalani diselenggarakan pada Sekretariat Jenderal DPR RI Bagian Humas DPR RI. Waktu kajian dilakukan mulai dari bulan Januari 2022 Hingga Februari 2022. Alasan peneliti memilih lokasi di Sekretariat Jenderal DPR RI Bagian Humas dan Pengelolaan Meseum karena lokasi ini merupakan paling sentral saat pemberian informasi pada masyarakat, disamping itu juga Humas DPR RI berperan penting baik untuk memperbaiki citra DPR RI.

Sumber data dalam kajian yang dijalani terbagi atas 3 yakni informan, dokumen serta peristiwa. Informan dalam kajian yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dan Pengelolaan Museum, serta Kepala Subbagian Promosi, Diseminasi, Dan Edukasi Publik. Dalam kajian ini, dokumen yang akan digunakan berupa catatan tertulis maupun perekaman suara, pengambilan foto bersama informan, serta tulisan atau arsip Humas DPR RI yang mendukung

kajian ini dan memuat info mengenai Peran Humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan member check agar data yang diperoleh sepanjang penelitian bisa dijamin kredibilitasnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Humas DPR RI dalam Memperkuat Literasi Kewarganegaraan Masyarakat

3.1.1. Komunikator

Bagian Humas DPR RI berdasarkan wewenang dan tugasnya berperan dalam menyosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program kerja lembaganya kepada masyarakat. Selain itu dalam rangka menguatkan literasi kewarganegaraan masyarakat, komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPR RI bersifat orientasi publik, artinya Humas DPR RI dalam menyebarkan informasi haruslah membuat program internal sebagai wahana penguatan literasi kewarganegaraan masyarakat. Terdapat empat program kegiatan yang dijalankan oleh bagian Humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat antara lain, edukasi parlemen, parlemen remaja, perlemen kampus serta kunjungan masyarakat. Empat program kegiatan tersebut dikemas oleh bagian Humas DPR RI sebagai bentuk dalam menguatkan literasi kewarganegaraan masyarakat.

Literasi kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh Hubungan Masyarakat DPR RI melalui program kegiatannya bertujuan, sehingga masyarakat tak terprovokasi dengan berita palsu yang dapat menimbulkan perselisihan serta mampu membedakan kebenaran pada sebuah informasi. Hal ini sejalan pada pendapat Saidi, Supriyono dan Al-Atok (2022) dimana literasi kewarganegaraan bertujuan untuk mampu mengantarkan seseorang sehingga mempunyai kesanggupan dalam menerima, beradaptasi juga bersikap cerdas serta bijaksana atas keberagaman. Tentu selain untuk memenuhi hak informasi untuk publik, eksistensi Humas DPR RI, juga bertujuan untuk membentuk citra publik, supaya DPR RI menjadi lembaga negara yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik kembali. Karenanya Humas menurut Gruning harus ikut menciptakan perencanaan program kerja yang hendak diadakan sehingga komunikasi yang hendak disampaikan lembaga kepada masyarakat bisa berjalan secara baik (Perdana & Hermawati, 2020).

Peran Humas DPR RI menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari DPR RI kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada DPR RI. Hal itu tercermin dalam pelaksanaan program kegiatannya seperti edukasi parlemen, parlemen remaja, parlemen kampus maupun kunjungan masyarakat. Tentu guna mendukung proses interkasi komunikasi agar berjalan dengan baik Humas DPR RI dalam setiap kegiatannya memberikan leaflet, booklet, majalah, maupun buletin parlementaria, dengan tujuan masyarakat dapat lebih memahami informasi yang telah disampaikan. Sidharta, Arlena dan Azwar (2021) menjelaskan bahwa Hubungan Masyarakat (Public Relations) memiliki

tujuan utama memberikan pengaruh pada masyarakatnya, sejauh apakah mereka mengenal juga mengetahui aktivitas lembaga ataupun instansi yang diwakili, yang akhirnya menjadi dikenal juga disukai oleh masyarakatnya.

3.1.2. Fasilitator

Bagian Humas DPR RI dalam peran ini untuk memfasilitasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan aspirasi kepada DPR RI untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip *check and balances*, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi DPR RI. Tentu dalam hal memperoleh ataupun menyampaikan aspirasi kepada DPR RI baik secara langsung maupun online Humas DPR RI mewadahi itu semua, secara langsung masyarakat bisa datang ke ruangan layanan informasi publik, secara online bisa melalui website PPID atau mobile PPID. Kegiatan yang dilakukan tersebut mencerminkan Humas menurut Gruning dalam penyebaran informasi tak sebatas dilaksanakan secara langsung, namun juga dilaksanakan secara online (Perdana & Hermawati, 2020).

Sebagai Lembaga Negara Humas DPR RI memberikan informasi ataupun data yang cukup bagi masyarakat, guna memberikan informasi atau data tersebut Humas DPR RI memfasilitasi masyarakat melalui berbagai platform dalam mengedukasi masyarakat melalui media social Humas DPR RI yang bernama Edukasi Parlemen seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok. Selain itu Humas DPR RI pun melakukan siaran langsung di Instagram live maupun Youtube live guna memberikan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan media sosial dimasa sekarang sangatlah penting karena dengan adanya sosial media didalam suatu Lembaga Negara dalam hal ini Humas DPR RI dengan membuat program-program kerjanya yang dijalankan secara edukatif sehingga dapat lebih cepat penyebaran informasinya kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai pada kajian yang dilaksanakan Fitriani (2017) yang mana media sosial ialah sebuah sarana yang sangat berguna dalam menyebarkan informasi untuk masyarakat baik itu dibidang keagamaan, bisnis, pariwisata, kesehatan maupun politik secara cepat juga mudah. Pendapat tersebut juga dipertegas oleh pendapat Ganggi (2018) bahwa media sosial menjadi sebuah media dalam penyebaran informasi baik tentang diri sendiri ataupun informasi yang bersifat umum. Tentu dengan keberadaan media sosial Humas DPR RI dapat membentuk literasi digital kewarganegaraan. Literasi kewarganegaraan digital dapat membantu masyarakat melek teknologi, politik, dapat berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar (Pratiwi & Asyarotin, 2019).

3.2. Program Humas DPR RI dalam Memperkuat Literasi Kewarganegaraan Masyarakat

3.2.1. Edukasi Parlemen

Edukasi Parlemen ialah program kerja yang dibentuk Humas DPR RI selaku usaha penjalinan hubungan yang baik serta pengedukasian rakyat. Aktivitas ini mempunyai maksud pemberian edukasi pada masyarakat (Siswa/Mahasiswa/Organisasi) berhubungan pada penjalanan tugas, fungsi, wewenang serta mekanisme kerja DPR RI sehingga dapat memberi pemahaman lebih kepada masyarakat. Program Edukasi Parlemen tersebut disusun pada konsepsi *edutainment* (Education Plus Entertainment), hingga serangkaian aktivitas tersebut

dirangkai dengan menarik serta memanfaatkan keikutsertaan peserta pada tahapan belajar mengajar. Hal ini sependapat dengan gagasan Nurdin (2021) bahwa edutaimen ialah tahap pembelajaran yang diciptakan melalui memasukkan muatan pendidikan beserta hiburan dengan setara, hingga kegiatan belajar mengajar bisa dilangsungkan secara menggembirakan.

Umumnya rangkaian aktivitas ini berisikan diskusi juga simulasi dan diselenggarakan pada Ruang Abdul Muis (operation room) yang diteruskan pada observasi melalui kunjungan Museum DPR RI juga Ruang Sidang Paripurna 1 pada kompleks Gedung Nusantara yang diketuai oleh Pamong Budaya Sekretariat Jenderal DPR RI, namun selama pandemi kegiatan yang dilaksanakan dilakukan secara daring dan penerimaan tamu setiap hari mulai pukul Sembilan hingga pukul dua belas siang. Aktivitas Edukasi Parlemen dilaksanakan melalui dua cara, yang meliputi: Luring, masyarakat hadir langsung pada Gedung DPR RI serta diterima pada ruang Abdul Muis guna memulainya diskusi juga simulasi, mengenai tugas, fungsi, wewenang, serta mekanisme pekerjaan DPR RI dengan menghadirkan narasumber dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang diketuai oleh moderator. Sesudahnya, Masyarakat diajak mengelilingi gedung DPR RI terutama pada Museum DPR RI serta Ruang Sidang Paripurna 1 dalam rangka melaksanakan observasi juga penelaahan sejarah. Daring, Edukasi Parlemen diselenggarakan melalui pemanfaatan sarana virtual meeting. Selanjutnya susunan kegiatan yang tak jauh berbeda pada apa yang diselenggarakan secara luring, tetapi semua kegiatan dilakukan secara virtual. Observasi pada Museum DPR RI diselenggarakan melalui pemanfaatan teknologi virtual tour. Edukasi parlemen secara daring tersebut dilakukan agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, ataupun masyarakat yang mempunyai keterbatasan maupun kendala untuk datang secara fisik.

3.2.2. Parlemen Remaja

Parlemen Remaja ialah aktivitas belajar mengajar politik pada generasi masa kini, terutama pelajar tingkat SMA dan sederajat yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Parlemen remaja memberi dampak pada peningkatan pemahaman terkait politik terhadap peserta didik SMA dan Sederajat mengenai bagaimanakah proses demokrasi juga politik bekerja di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kajian Fudge dan Skipworth (2017) mengutarakan jika civic literacy ialah kemampuan yang berarti untuk peserta didik agar dipahami sebab memberi dasar pemahaman yang lebih tepat mengenai kekompleksan pemerintahan serta dunia politik. Selain itu siswa dapat lebih mengenal mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku instansi Negara yang menyelenggarakan fungsi politik dibidang legislasi (Legislation Control), Pengawasan (Political Control), serta Anggaran (Budgetary Control).

Kegiatan Parlemen Remaja dalam pelaksanaannya mereka merasa simulasi sebagai Anggota DPR RI sepanjang 5 hari yang meliputi tiga hari pembekalan, satu hari untuk kunjungan kerja, dan satu harinya lagi mereka melakukan simulasi persidangan DPR RI, rapat kerja maupun paripurna. Parlemen Remaja tersebut memiliki maksud agar memasyarakatkan fungsi juga peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada remaja selaku generasi penerus, memberi pengertian pada peserta didik mengenai tahap penciptaan kebijakan publik pada parlemen, hingga peningkatan wawasan mengenai proses demokrasi di Indonesia dengan menyelenggarakan simulasi Parlemen.

3.2.3. Parlemen Kampus

Parlemen kampus merupakan kegiatan untuk mengedukasi bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjalankan fungsinya dibidang pengawasan, anggaran, legislasi maupun diplomasi parlemen. Parlemen kampus hampir sama kegiatan yang dilakukan seperti parlemen remaja namun yang membedakan parlemen kampus ini peserta dan panitianya penyelenggara bersasal dari kalangan mahasiswa atau tempat universitas mahasiswa. Kegiatan parlemen kampus berbeda dengan kegiatan parlemen remaja jika parlemen remaja dilaksanakan dalam waktu sepekan namun jika parlemen kampus hanya dilaksanakan dalam waktu yang singkat yaitu dua hari, dimana mencakup satu hari seminar atau orientasi dan satu hari berikutnya simulasi rapat kerja dan rapat paripurna.

Acara parlemen kampus dilaksanakan setahun sekali oleh Hubungan Masyarakat DPR RI sebagai wujud komitmen Humas DPR RI dalam mendukung serta memberikan pembelajaran demokrasi masyarakat khususnya generasi muda. Kegiatan parlemen kampus ini memperkenalkan khususnya mahasiswa bagaimana kehidupan politik dan demokrasi melalui fungsi legislatif DPR RI. Selain itu kegiatan Parlemen Kampus ini memberi dampak pada generasi muda untuk sejak dini dapat peduli terhadap isu-isu politik yang menyangkut kebijakan publik, sehingga bisa menjadi bagian dari harapan dan memastikan sebuah kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Baik kegiatan Parlemen Remaja maupun Parlemen Kampus itu bertujuan untuk mengkolaborasi atau mempersiapkan mereka sebagai agent of change, atau bisa disebut agentnya DPR RI atau Duta DPR RI.

3.2.4. Kunjungan Masyarakat

Kegiatan kunjungan masyarakat dilaksanakan setiap hari senin-kamis mulai pukul sembilan pagi hingga pukul dua belas siang, kegiatan ini dilaksanakan oleh Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Humas DPR RI). Kunjungan masyarakat ini bisanya dilaksanakan ketika bagian Humas DPR RI atau Setjen DPR RI mengadakan event seperti Seminar dan pameran yang merupakan bagian dari kegiatan kunjungan masyarakat, dengan aktivitas tersebut bisa dijadikan media belajar serta bisa didatangi oleh rakyat guna memperoleh beragam memori kolektif sejarah parlemen yang ada. Kegiatan seminar meliputi bakohumas, hari meseum internasional, dan keterbukaan informasi publik. Sedangkan untuk pameran sendiri meliputi lergisasli expo dan konvensi humas nasional. Selain itu juga kunjungan masyarakat ini banyak dipergunakan oleh para mahasiswa yang menyelenggarakan riset saat pembuatan paper ataupun skripsi.

3.3. Kendala Humas DPR RI dalam Memperkuat Literasi Kewarganegaraan Masyarakat

3.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia salah satu yang sangat penting dalam suatu organisasi, baik intitusi pemerintahan maupun non pemerintahan. Karenanya sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi ataupun intitusi (Prasetyo et al., 2021). Bagian Hubungan Masyarakat DPR RI didalam menjalankan kegiatan program kerjanya, masih menemui kendala yakni minimnya sumber daya manusia yang menguasai atau berkompeten dibidangnya. Humas DPR RI dalam melakukan implementasi program kerjanya untuk

memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat masih terhambat dengan SDM yang kompeten dibidannya. Selain itu didalam bagian Humas juga kekurangan SDM. SDM sangat dibutuhkan maka didalam menjalankan atau melaksanakan program kerja dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dalam menjalankan suatu program kerjanya itu bagaimana kompetensi Sumber Daya Manusiannya. Hal ini sejalan dengan gagasan (Larasati, 2018) bahwa SDM yang berkompeten sangat dibutuhkan pada lingkungan kompetitif. Seseorang dengan kompetensi kerja baik tentunya akan mudah dalam pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan juga dapat menyesuaikan dirinyadengan baik pada lingkungan sekitarnya.

3.3.2. Sarana dan Prasarana

Bagian Hubungan Masyarakat DPR RI kerap kali kesulitan untuk mendapatkan tempat ketika melaksanakan kegiatannya. Hal ini dikarenakan tak adanya ruangan khusus untuk menerima masyarakat, penerimaan masyarakat dalam rangka studi, riset maupun hal lainnya, sering terkendala sebab permasalahan teknis yakni, seluruh ruangan sudah dipergunakan untuk rapat. Selain itu kendala yang dihadapi oleh Humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat yakni proses transisi dari kegiatan luring menuju kegiatan daring mengingat pada masa pandemi COVID-19 kegiatan sepenuhnya dialihkan kepada daring. Pada awal pandemi COVID-19 Humas DPR RI mengalami kesulitan untuk melaksanakan kegiatannya mengingat keterbatasan tempat yang ada dan tidak memungkinkan semua kegiatan program berjalan dengan baik seperti pada masa sebelum pandemi COVID-19.

3.3.3. Alokasi Waktu

Kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Hubungan Masyarakat DPR RI mulai dari edukasi parlemen, parlemen remaja, parlemen kampus dan kunjungan masyarakat relatif sangat singkat hal ini menjadi kendala yang dihadapi oleh Bagian Humas DPR RI. Alokasi waktu menjadi hal penting dalam setiap program yang dilakukan oleh Humas DPR RI untuk menentukan kegiatan tersebut apakah sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga juga akan berpengaruh kepada pemahaman masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Hubungan Masyarakat DPR RI saat menguatkan literasi kewarganegaraan masyarakat tidak serta-merta mudah dilakukan kendala yang dihadapi, seperti masih minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya pada sisi sarana juga prasarana ataupun penempatan waktu yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut menjadi bukti perlunya melakukan perbaikan. Suatu program kegiatan dikatakan berhasil atau tidak bagaimana sumber daya manusianya itu sendiri, proses pelaksanaan kegiatan bisa selesai dengan waktu yang telah direncanakan itu juga bagaimana SDMnya. Dengan demikian SDM menjadi penentu dari terselenggaranya program kegiatan yang dilaksanakan oleh Humas DPR RI. Seseorang dengan kompetensi kerja baik tentunya akan mempermudah dirinya dalam pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan hingga dapat beradaptasidengan baik pada lingkungan sekitarnya.

3.4. Upaya Humas DPR RI dalam Mengatasi Kendala dalam Memperkuat Literasi Kewarganegaraan Masyarakat

Upaya untuk mengatasi kendala dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat yaitu Pertama dari Sumber Daya Manusia dibutuhkan pengembangan dimana setiap individu dibagian Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum melaksanakan kegiatan atau pelaksanaan program kerjanya terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Pelatihan yang dimaksud ialah pada jurnalistik guna menambah keterampilan pada pembuatan rilis berita. Pelatihan kehumasan, sehingga mampu memahami secara meluas peranan juga kegunaan Humas. Selain itu bagian Humas DPR RI mengajak atau berkolaborasi dengan unit kerja lainnya di sekretariat DPR RI, seperti Pusat Pendidikan serta pelatihan, pusat penelitian, hingga pusat perencanaan UU. Hal ini dilakukan agar setiap Sumber Daya Manusia di bagian Humas DPR RI dapat terus meningkatkan kompetensinya dibidang program kerja yang dilaksanakan. Hal itu sejalan dengan pendapat (Prasetyo et al., 2021) Perkembangan ialah tahapan memperoleh pengalaman, keahlian, juga sikap peraih kesuksesan pada organisasi. Selain itu tentunya menimbulkan tindakan agar melaksanakan aktivitas belajar pada jangka waktu yang lama. Perkembangan SDM merupakan aktivitas yang perlu dilaksanakan organisasi dalam hal ini Humas DPR RI sehingga wawasan (knowledge), kemampuan (Ability), serta ketrampilan (skill) mereka sejalan pada aturan pekerjaan yang dilaksanakan.

Kedua, didalam mengatasi kendala sarana dan prasarana bagian Hubungan Masyarakat DPR RI meminta persetujuan Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) untuk perlu dibuat sebuah ruangan perencanaan secara menyeluruh tentang penggunaan ruangan tetap agar kegiatan yang dilakukan oleh Humas DPR RI dapat tertampung seluruhnya, agar terwujudnya tujuan penyampaian informasi yang baik, tetap juga valid, selain agar memenuhi tertib administrasi. Selain hal tersebut guna mengatasi kendala yang hadir pada masa pandemi COVID-19 melanda, bagian Humas DPR RI bekerja sama dengan bagian teknologi kesekretariatan DPR RI untuk melakukan terobosan inovasi agar kegiatan yang dilakukan selain melalui daring namun memiliki esensi pengemasan kegiatan kekinian melalui platform media sosial yang sekarang dimiliki oleh bagian Humas DPR RI. Diantaranya Edukasi Parlemen, Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta museum DPR RI. Ketiga, upaya dalam mengatasi hambatan alokasi waktu bagian Hubungan Masyarakat DPR RI yang dirasa kurang memadai, Humas DPR RI memberikan cendera mata yaitu tata tertib DPR RI, majalah juga buletin Parlementeria. Selain itu Humas juga memaksimalkan platform media sosial agar informasi yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan dapat dipahami kembali oleh masyarakat.

Perkembangan SDM saat melaksanakan sebuah kegiatan tentu sangat perlu dilakukan, termasuk SDM yang terdapat pada lingkup Hubungan Masyarakat DPR RI. Perkembangan SDM menjadi aktivitas yang perlu organisasi dalam hal ini Humas DPR RI sehingga pengetahuan (knowledge), kemampuan (Ability), juga ketrampilan (skill) yang dipunya sejalan pada aturan pekerjaan yang dilaksanakan. Hasil pengembangan sumber daya manusia tersebut, tentu berimbas kepada peningkatan sarana dan prasarana maupun pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan Humas DPR RI dalam rangka memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat. Seperti halnya terobosan inovasi agar kegiatan yang dilakukan selain melalui daring namun memiliki esensi pengemasan kegiatan kekinian melalui platform media sosial Humas DPR RI.

4. Simpulan

Humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat memiliki peran sebagai komunikator, fasilitator serta media komunikasi. Humas DPR RI mengimplementasikan program kerjanya dalam sebuah kegiatan yang Edukasi Parlemen, Parlemen Remaja, Parlemen Kampus serta kegiatan kunjungan masyarakat seperti seminar seminar dan pameran. Kendala dalam implementasi program kerja Humas DPR RI guna memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat ialah masih minimnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai atau berkompeten dibidangnya, dari segi sarana dan prasarana kapasitas tempat ruangan masih minim selain itu proses transisi kegiatan dari luar jaringan ke dalam jaringan serta dari alokasi waktu kegiatan yang dilaksanakan relatif sangat singkat. Upaya mengatasi kendala implementasi program kerja dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat yaitu dengan pertama setiap individu dibagian Humas DPR RI sebelum melaksanakan kegiatan atau pelaksanaan program kerjanya terlebih dahulu mengikuti pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan yang kedua mengajak atau berkolaborasi dengan unit kerja lainnya di sekretariat DPR RI. Humas DPR RI meminta agar kapasitas tempat ruangan untuk bisa ditambah dan melakukan terobosan inovasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, serta dari segi alokasi waktu Humas DPR RI memberikan cendera mata berupa tata tertib DPR RI, majalah juga buletin Parlementeria. Selain itu Humas juga memaksimalkan platform media sosial agar informasi yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan dapat dipahami kembali oleh masyarakat.

Daftar Rujukan

- Al Habib, D. R., & Suratman, B. (2018). Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada Lembaga Pemerintahan DPRD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 6(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JPAPUNESA/article/view/32139>
- Armawi, A. (2020). Reduksi Informasi Hoax di Era Digital Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 1-13.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 19(2), 148-152. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/paradigma/article/view/2120/1708>
- Fudge, D., & Skipworth, S. A. (2017). Kids in the Capitol: Improving Civic Literacy Through Experiential Learning. *Learning: Research and Practice*, 3(2), 163–167.
- Ganggi, R. I. P. (2018). Materi pokok dalam literasi media sosial sebagai salah satu upaya mewujudkan masyarakat yang kritis dalam bermedia sosial. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(4), 337-345. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3681/2061>
- Hamid, S. I., Istanti, T., Firmansyah, F., Ismail, H., & Abdilah, F. (2020, November). Implementasi Model Literasi Kewarganegaraan Berbasis Tradisi Lokal Sunda Melalui Pembelajaran Tembang Pupuh dan Nyanyian Permainan Anak di Jawa Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat: Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi* (pp. 30-38). Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.
- Irianto, P. O., & Febrianti, L. Y. (2017, June). Pentingnya penguasaan literasi bagi generasi muda dalam menghadapi MEA. In *Proceedings Education and Language International Conference* (Vol. 1, No. 1).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*. Jakarta: Kemendikbud.
- Larasati, S. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Deepublish.
- Litbang Kompas. (2019). *Citra DPR Menurut Litbang Kompas 2019*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/08370591/litbangkompas-662-persen-responden-merasa-aspirasinya-tak-terwaki>

- Maimun, M., Sanusi, S., Rusli, Y., & Muthia, H. (2020). Internalisasi Nilai-nilai Karakter Kebangsaan Melalui Literasi Budaya dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Banda Aceh. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 8-15.
- Mazid, S. (2017). Rekonstruksi Pendidikan Kewargaan Multikultural dalam Bingkai Keindonesiaan yang Beradab. *Literasi Hukum*, 1(1), 27-36.
- Nurdin, N. (2021). Penerapan Konsep Pembelajaran Inovatif Dan Kreatif Melalui Pembelajaran Berbasis Edutainment Dalam Pembelajaran Di PAUD. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 56-67.
- OECD. (2019). *Programme for International Students Assessment (PISA)- Results from PISA 2018, Country Note: Indonesia*. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf
- Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Perdana, R., & Hermawati, T. (2018). Humas Dalam Membangun Citra. *Jurnal Rakha*, 4(1).
- Prasetyo, B. D., Pranata, E. P., Meydina, I., Fauzi, Z. N., & Sunarsi, D. (2021). Pelatihan Strategi Bersaing Sumber Daya Manusia di Era 5.0 Pada Masyarakat Desa. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(4).
- Prasetyo, K. (2016). Koalisi Dominan Humas DPR-RI sebagai Boundary Spanner dalam Mewujudkan Good Governance melalui Informasi Publik. *Jurnal Media Kom*, 6(2), 16-30.
- Pratiwi, A., & Asyarotin, E. N. K. (2019). Implementasi literasi budaya dan kewargaan sebagai solusi disinformasi pada generasi millennial di Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 7(1), 65-80.
- Saidi, M. R., Supriyono, S., & Al-Atok, A. R. (2022). Pengaruh Literasi Digital dan Literasi Kewarganegaraan terhadap Tingkat Ketahanan Pribadi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 119-128.
- Sidharta, V., Anisti, A., Arlena, W. M., & Azwar, A. (2021). Strategi komunikasi humas biro pemberitaan DPR RI dalam menjaga citra positif organisasi. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 106-113.
- Sujastika, I., & Abdulkarim, A. (2022, January). Civic Education Textbook Presentation of Seventh Grade Based on Cultural Literacy and Citizenship. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* (pp. 180-185). Atlantis Press.
- Suryadi, K. (2010). *Inovasi nilai dan fungsi komunikasi partai politik bagi penguatan civic literacy*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Tachyudin, M., Cahyono, H., & Utami, P. S. (2020). Penguatan Civic Literasi Dalam Membentuk Wawasan Kebangsaan. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 4(2 Extra), 31-39.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Yuliadari, E., Rusnaini, R., & Ariana, Y. (2018). Penguatan Civic Literacy dalam Pembelajaran Demokrasi dan Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Civic Attitude Mahasiswa. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 13(2), 115-122.
- Yusuf, R., & Putra, I. (2019, October). Pelaksanaan Literasi Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh. In *Prosiding Seminar Nasional "Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia"* (Vol. 1, pp. 143-150). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.